

ALIRAN-ALIRAN DALAM ISLAM DAN PENGARUHNYA PADA PESANTREN, NU DAN PANCASILA DI INDONESIA (TELAAH SEJARAH DAN PEMIKIRAN)

Oleh: Abdulloh Shodiq
Dosen STAI Salahuddin Pasuruan

Abstrak

Pertama kali penyebab lahirnya aliran-aliran dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari masalah politik setelah wafatnya Nabi Muhamad SAW. Maka lahirlah aliran-aliran syi'ah, khawarij, mu'tazilah, dan sebagainya di kemudian hari berpengaruh ke negara-negara, termasuk Negara Indonesia.

Syi'ah di Indonesia sebenarnya jauh lebih tua dari kemerdekaan RI. Kerajaan Islam pertama kali berdiri di Indonesia yaitu di Perlak tahun 225 H atau 845 M, boleh dikatakan Kerajaan Syi'ah. Kemudian kira-kira pada tahun 457 H atau 1065 M mulailah pertumbuhan dan kebangkitan keilmuan Sunni yang mendorong pertumbuhan pendidikan Islam, seperti pendidikan pesantren yang berhaluan Sunni (*Ahlu Sunnah wal Jama'ah*). Dari pesantren-pesantren ini maka lahirlah organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam di kemudian hari, seperti Nahdhatul Ulama (NU). Dalam sejarah pertumbuhannya, NU adalah ormas pertama kali yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan salah satu implementasi nilai ideologi Pancasila dalam hidup bermasyarakat di Indonesia adalah memupuk persaudaraan dan harga-menghargai antar umat Islam dan umat yang beragama lain. Hal ini membuktikan bahwa toleransi umat beragama mempunyai tempat dalam pesantren Ahlu Sunnah, NU dan Pancasila

A. PEMBAHASAN

1. Kelahiran dan Pengaruh Aliran-aliran dalam Islam

Berbicara tentang aliran-aliran dalam Islam baik Sunni, Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah atau Murji'ah dan sempalan-sempalannya sebenarnya susah dipisahkan dari masalah politik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu tentang Khilafah atau pemilihan tentang pengganti Rasulullah SAW setelah meninggal dunia. Berarti persoalan politik itulah penyebab utama yang memicu lahirnya aliran-aliran (sekte-sekte) dalam Islam di kemudian hari.

Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak pernah berwasiat kepada pemuka-pemuka sahabat tentang jabatan khalifah dan cara-cara pemilihannya termasuk tentang sistem pemerintahan. Demikian juga tentang bentuk-bentuk Negara ideal bagi umat Islam. Oleh karena masalah khilafah itu dianggap penting demi kepentingan umum, maka umat Islam berusaha mencari dan memilih seseorang yang layak untuk dipilih sebagai khalifah agar bendera Islam tetap tegak di muka bumi.

Dalam rangka itu muncul dua golongan besar Islam yang masing-masing mempertahankan eksistensinya demi memperoleh jabatan tertentu. Dua golongan itu adalah kaum *Anshar* dan

Muhajirin. Golongan pertama berpendirian, seharusnya dari kaum Anshar muncul seseorang yang diangkat sebagai khalifah sebab mereka pernah menolong dan menjaga Rasulullah SAW dari serangan dan gangguan kaum kafir Quraisy baik serangan/gangguan yang bersifat fisik maupun tekanan mental. Golongan yang kedua berpendirian, hendaknya masalah khilafah atau kepemimpinan itu dipilih dan yang berhak dipilih sebaiknya ditentukan dari kaum Muhajirin.

Akhirnya kedua golongan tersebut sepakat mengadakan pertemuan di sebuah tempat yang disebut *Tsaqifah bani Saidah*, dan dari pertemuan itu mereka sepakat membuah hasil kesepakatan bahwa Abu Bakar At-Taimiyi layak terpilih sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW.

Dalam pertemuan tadi sahabat Ali bin Abi Thalib dan segenap keluarga Nabi berhalangan hadir karena mereka sibuk mengurus janazah Rasulullah SAW. Ketika mendengar berita terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah, mulailah golongan Islam yang lain muncul, yaitu golongan Ahlul Bait, seperti Fatimah binti Rasul dan istrinya Ali bin Abi Thalib. Ali mula-mula enggan membaiat Abu Bakar, mungkin ia tertekan psikologis istrinya Fatimah

yang masih sedih ditinggal wafat sang ayahnya sehingga ia tidak berburu-buru membait Abu Bakar. Baru kemudian 40 hari setelah itu, beliau dengan tulus menerimanya meski istrinya masih belum mau membaiatnya. Sebagian besar keluarga Nabi tetap ingkar dan menjunjung tinggi nama Ali untuk menjabat sebagai khalifah. Itulah sebabnya golongan Islam ketiga yaitu Ahlul Bait, mulai lahir. Dengan demikian, semenjak wafatnya Rasulullah SAW, ketiga aliran dalam Islam itu muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Yang melatar belakangi golongan Ahlil Bait itu lahir, karena golongan ini berpandangan bahwa seharusnya dari Ahlul Bait-lah yang berhak sebagai khalifah pengganti Rasul. Mereka mengusulkan Abbas bin Abdul Muthalib atau Ali bin Abi Thalib. Abbas dan Ali oleh mereka dianggap sebagai tokoh yang mampu sebab dilihat dari darah keturunannya mereka berdua masing-masing sebagai paman dan anak paman Rasulullah sendiri. Namun mereka lebih cenderung memilih Ali daripada memilih Abbas karena Ali dikenal sebagai ilmuwan yang paling awal masuk Islam dan tidak pernah menyembah berhala, di samping itu Ali adalah menantu Rasulullah SAW (Ahmad Amin 1965). Alasan lain yang

muncul, ada sebagian pengikut ekstrimis Ali menganggap adanya suatu *nash* tentang kekhalfahan Ali. Inilah yang menyebabkan lahirnya golongan ketiga Ahlil Bait.

Berangkat dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa lahirnya ketiga golongan tersebut diawali masalah politik dalam kaitannya dengan pemilihan pencalonan khalifah. Hal ini di kemudian hari sangat banyak mempengaruhi lahirnya aliran-aliran atau ideologi baru dalam Islam seperti Syi'ah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Ahlu Sunnah dan sebagainya.

Dalam perkembangan berikutnya, aliran-aliran itu tidak lagi berbicara soal politik dan pemerintahan, tetapi berbicara juga masalah aqidah dan hukum. Perkembangan seperti ini dipengaruhi perubahan situasi dan kondisi sosial masyarakat sekitarnya dan perubahan yang sangat pesat terjadi adalah di masa kejayaan Daulah Abbasiyah, terutama pada Khalifah Harun al-Rasyid, al-Ma'mun, dan al-Amin. Pada masa pemerintahan Abbasiyah itu telah banyak pikiran-pikiran yang banyak mempengaruhi orang-orang Islam, seperti paham filsafat, tasawuf, dan paham zoroster, dan sebagainya. Aliran-aliran tersebut terutama Syi'ah dan Sunni menyebar luas dari daratan Arab sampai

ke wilayah Asia, termasuk di Indonesia. Kedua aliran ini dari dulu hingga sekarang masih terjadi perselisihan dan konflik bahkan sampai terjadi tragedi fisik di beberapa negara baru-baru ini, seperti di Yaman dan sebagian daerah di Indonesia.

2. Syi'ah dan Ahlu Sunnah di Indonesia

Sejarah Syi'ah di Indonesia sebenarnya jauh lebih tua dari kemerdekaan Indonesia. Bahkan sejumlah sumber menduga Syi'ah masuk ke nusantara sejak Dinasti Abbasiyah, pada masa pemerintahan Khalifah yang berkuasa di Baghdad pada tahun 750-1258. Kerajaan Islam pertama kali berdiri di Indonesia yaitu di Perlak tahun 225 H atau 845 M, boleh dikatakan **Kerajaan Syi'ah**. Dalam pada itu, bermunculan aliran dan sekte yang menunggangi Syi'ah termasuk aliran Kebatinan. Sifat Syi'ah pada waktu itu dikuasai partai politik lebih menonjol. Setelah kerajaan ini dikuasai oleh Kerajaan Sunni dan Syi'ah ditindas, maka Syi'ah hijrah ke daerah kerajaan Islam di Samudera Pasai. Di sinilah ia dengan diboncengi aliran kebatinan tersebut dapat mengembangkan dirinya menjadi satu kekuatan kebatinan, sehingga ajaran Syi'ah tidak menonjol, hanya yang menonjol kemudian adalah aliran yang bernama *Wihdatul Wujud* (Hasjmy 1983).

Aliran kebatinan (termasuk *wihdatul wujud*) yang membonceng Syi'ah yang semula di Samudera Pasai tersebut mengalami bermacam proses kemudian berkembang sampai ke pulau Jawa. Seorang ulama besar dari aliran *wihdatul wujud* Syekh Abdul Jalil dikirim ke Jawa oleh Perdana Menteri Bakoy Ahmad Pamala untuk berdakwa yang kemudian terkenal sebagai wali, seperti wali-wali di Jawa yang lebih umum disebut Wali Songo. Syekh itu adalah Siti Jenar (Junus Jamil 1968: 16-17). Akan tetapi karena ajaran pendidikan tasawufnya dianggap oleh wali-wali lainnya bertentangan dengan hukum syari'at, maka Siti Jenar dihukum mati.

Dalam pada itu dakwah dan pendidikan agama Islam di Jawa disiarkan oleh para wali 8 atau 9 orang jumlahnya. Mereka itu guru besar agama yang mempunyai kesaktian yang *ghaib*, tetapi mereka mempunyai pula kecakapan militer, dan di antara mereka ada yang memegang kekuasaan atas suatu daerah, dan wali yang tertua adalah Wali Maulana Malik Ibrahim yang dimakamkan di Gresik pada tahun 1419 (Soeroto 1962: 177). Para wali itu di samping sebagai guru pendidikan agama, juga sebagai penasehat Raja. Di Demak, penasehat Raden Fatah, Raja pertama Demak, adalah para wali, terutama Sunan

Ampel dan Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati, bahkan di samping berperan sebagai guru agama dan muballigh, juga berperan langsung sebagai kepala pemerintahan (Badri Yatim, 2003: 300). Jadi para wali itu di samping mempunyai kesaktian, juga mempunyai kecakapan dalam politik pemerintahan sehingga dengan bekal kedua hal inilah, agama Islam tersebar di pulau Jawa.

3. Ahlu Sunnah, Pesantren, NU dan Pancasila

Sejarah mengatakan bahwa pemerintah Islam yang dikenal pertama kali mencampuri masalah pendidikan adalah Khalifah Nizam al-Mulk (1065 atau 457 H), seorang penguasa dari Bani Saljuk yang memprakarsai berdirinya madrasah Nizamiyah di Baghdad. Madrasah ini berhaluan Sunni dan mempunyai jaringan khusus dengan model pendidikan *al-Kuttab* dan *ar-Ribath* (pondokan tempat kaderisasi ulama) yang berkembang di daratan Hijaz atau Haramain (Abuddin Nata, 2010) Kebangkitan madrasah Nizamiyah ini merangsang kebangkitan keilmuan Sunni yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam secara mayoritas (Muhamad Ishom, 2008).

Lembaga pendidikan Islam yang mirip dengan keberadaan lembaga dari pendidikan yang terdapat di *al-Kuttab* dan *ar-Ribath* tersebut adalah **pesantren** yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura. Oleh karena itu kebanyakan pesantren di Indonesia berhaluan Sunni (*Ahlu Sunnah wal Jama'ah*). Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, akan tetapi tidak dapat diketahui secara pasti kapan dan di mana mulai adanya pesantren itu. Kendati demikian dapat diketahui bahwa pada abad ke 17 telah ada pesantren di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Fatah (Mulyanto Sumardi, 1978).

Berangkat dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kerajaan Islam pertama kali berdiri di wilayah Sumatera Utara Indonesia yaitu di Perlak pada tahun 225 H atau 845 M, boleh dikatakan sebagai **Kerajaan Syi'ah**. Kemudian kira-kira pada tahun 457 H atau 1065 M mulailah pertumbuhan dan kebangkitan keilmuan Sunni yang mendorong pertumbuhan pendidikan Islam, seperti pendidikan pesantren yang berhaluan Sunni (*Ahlu Sunnah wal Jama'ah*). Dari pesantren-pesantren ini maka lahirlah organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam di

kemudian hari, seperti Nahdhatul Ulama (NU) yang berdiri pada tahun 1926, dipelopori berdirinya oleh KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Hasbullah, dan KH Bisri Syamsuri. Organisasi NU ini bernafaskan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Dalam perkembangan dan sejarah pertumbuhannya, NU adalah ormas pertama kali yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan organisasi inilah yang paling mudah menerimanya dibanding organisasi kemasyarakatan lain. Pada tahun 1982 menjelang muktamarnya yang ke 27, dalam tubuh NU terjadi konflik antara "kubu ulama" dengan "kubu politisi". Yang pertama dipelopori oleh KH Ali Maksum dan KH Syamsul Arifin, sedangkan kubu yang kedua dipelopori oleh KH Idham Khalid.

Dalam Muktamar di Situbondo Jawa Timur, pada bulan Desember 1983, ada tiga topik utama yang hangat yaitu (1) soal pergantian kepengurusan, terutama penyelesaian konflik antara KH Idham Khalid cs, dengan kubu ulama; (2) Soal asas tunggal Pancasila; dan (3) soal Khittah organisasi.

KH As'ad Arifin sebelum Munas NU menemui Presiden Soeharto untuk membicarakan sikap NU terhadap asas tunggal Pancasila. KH As'ad mengatakan

bahwa sebagian besar ulama NU dan umat Islam Indonesia berpendapat menerima Pancasila hukumnya wajib. Selanjutnya dalam Munas NU tahun 1983 dengan mulus diputuskan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi dan mengembalikan NU sebagai organisasi *Jamiyah*, sesuai dengan khittah 1926. Dalam Muktamar NU ke 27, yang dibuka oleh Presiden dan dihadiri oleh banyak Menteri, keputusan Munas tersebut dikukuhkan, dan dikeluarkan deklarasi tentang hubungan antara Pancasila dan Islam sebagai berikut:

- a) Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
- b) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dasar Negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
- c) Bagi Nahdhatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.

- d) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
- e) Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, Nahdhatul Ulama berkuajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Poin-poin di atas menegaskan bahwa NU menerima Pancasila tanpa *reserve*, tetapi "Pancasila" yang diterima adalah interpretasinya sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pengamalan Pancasila adalah sama dengan pengamalan Islam. Bahkan ditegaskan, Pancasila tidak menggantikan Islam, sebab Pancasila bukanlah agama. Pancasila adalah falsafah Negara Republik Indonesia. Dengan cerdas, NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal tanpa menghilangkan semangat keislamannya.

Salah satu argumentasi mengapa NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal, karena NU berpijak pada paham teologi *Ahlus al-Sunnah wa al-Jamaah*. Dalam paham teologi ini, wajib hukumnya menaati Pemerintahan yang

sah. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan salah satu syarat perlengkapan Negara, maka secara otomatis ia pun diterima dan tidak ada alasan untuk menolaknya.

Ketika awal Indonesia akan merdeka, *pertama-tama* NU dan masyarakat pesantren turut berjuang dan bahkan di depan bersama masyarakat melawan penjajah Belanda tanpa pamrih demi kemerdekaan Negara Indonesia, yang *kedua* dalam G 30 S/PKI, NU dan masyarakat pesantren berada di barisan depan ikut andil mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang *ketiga* NU sebagai organisasi masyarakat adalah yang pertama menerima Pancasila tanpa *reserve*, sebagai asas tunggal, tetapi "Pancasila" yang diterima adalah interpretasinya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Setelah NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal, menyusul kemudian Organisasi Masyarakat Islam Muhammadiyah juga menerima Pancasila sebagai asas tunggal lewat Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta pada bulan Desember 1985 dan memasukkan Pancasila dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan tidak mengubah asas Islam yang sekarang ini.

Kemudian di tahun 2007 ada survey nasional yang bertajuk “Islam dan Kebangsaan” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang berlangsung Maret-April 2007 dengan jumlah responden 1.200 orang berusia 17-60 tahun tersebar di semua provinsi, dan hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden (84,7%) lebih mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila daripada beraspirasi Negara Islam (22,8%).

Salah satu implementasi nilai ideologi Pancasila dalam hidup bermasyarakat di Indonesia adalah memupuk persaudaraan dan menghargai antar umat Islam dan umat yang beragama lain. Hal ini amat dibutuhkan oleh semua pihak dalam masyarakat bangsa Indonesia untuk meningkatkan pencapaian nilai-nilai spiritual dan material yang sama-sama dibutuhkan untuk memperoleh tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Bahkan Islam sangat mengajarkan masyarakat pengikutnya persaudaraan dan saling menghargai antar mereka dan orang-orang yang berlainan agama, seperti dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, surat Al-Mumtahanah, ayat 8 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam sangat mengajarkan umat Islam untuk saling menghargai antar mereka dan orang-orang yang berlainan agama, sepanjang orang-orang yang berlainan agama itu tidak memerangi dan mengusir umat Islam dari negeri mereka. Seorang sejarawan muslim bangsa Mesir Prof. Dr. Ahmad Syalabi mengatakan bahwa dalam hijrah Nab khususnya ada 4 dasar pembentukan masyarakat Islam yang diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: (1) mendirikan masjid, masjid adalah tempat ibadah yang mempunyai potensi untuk menyatukan kaum muslimin, (2) mempersaudarakan antara sahabat Anshar dan Muhajirin dengan tali keimanan dan ketaqwaan, sehingga mereka dapat hidup tentram dan nyaman, (3) pembentukan “perjanjian bantu membantu antara kaum muslimin dan non muslimin”. Dengan perjanjian ini, mereka (yahudi, nasrani, dan majusi) diberi kebebasan untuk mengikuti ajaran agama masing-masing. Meski diberi kebebasan memeluk agama masing-masing, mereka sama-sama memelihara

dan melindungi kota Madinah dari serangan kafir Quraisy, dan (4) meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru (kota Madinah). Inilah dokumen politik yang diletakkan oleh Rasulullah SAW, dan ini pula sebagai dasar peradaban Islam yang berbeda dengan peradaban lainnya. Hal ini berarti Islam menghargai toleransi umat beragama.

Empat dasar pembentukan masyarakat Islam yang diletakkan oleh Rasulullah SAW itu mengandung sebagian pemikiran harga menghargai antar sesama umat Islam dan antar umat selain Islam. Harga menghargai ini tidak hanya terjadi di masa Rasulullah SAW, tetapi juga di masa empat Khalifah Rasul; Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali yang memerintah di kemudian hari. Bahkan juga di masa Daulah Umayyah dan Abasiyah.

Di istana raja Daulah Umayyah dan Daulah Abasiyah banyak sekali terdapat orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi bekerja sama dengan orang Islam di segala lapangan. Di istna Bani Umayyah, hidup seorang pujangga Nasrani yang sangat terkenal bernama al-Akhtal, di samping itu pernah juga hidup seorang dokter Nasrani bernama Jibril bin Bakhtisyu yang melayani keluarga raja Harun al-Rasyid dari Daulah Abasiyah.

B. KESIMPULAN

Pertama kali penyebab lahirnya aliran-aliran dalam Islam sebenarnya susah dipisahkan dari masalah politik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana urusan Khilafah atau pemilihan tentang pengganti Rasulullah SAW setelah meninggal dunia menjadi persoalan penting. Konsekwensinya, aliran-aliran itu, apakah syi'ah, khawarij, mu'tazilah, dan sebagainya di kemudian hari berpengaruh ke negara-negara, termasuk Negara Indonesia.

Syi'ah di Indonesia sebenarnya jauh lebih tua dari kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Islam pertama kali berdiri di Indonesia yaitu di Perlak tahun 225 H atau 845 M, boleh dikatakan **Kerajaan Syi'ah**. Sifat Syi'ah pada waktu itu dikuasai partai politik lebih menonjol. Setelah kerajaan ini dikuasai oleh Kerajaan Sunni dan Syi'ah ditindas, maka Syi'ah hijrah ke daerah kerajaan Islam di Samudera Pasai. Di sinilah ia dapat mengembangkan dirinya menjadi satu kekuatan kebatinan bernama *Wihdatul Wujud*.

Kemudian kira-kira pada tahun 457 H atau 1065 M mulailah pertumbuhan dan kebangkitan keilmuan Sunni yang mendorong pertumbuhan pendidikan Islam, seperti pendidikan pesantren yang berhaluan Sunni (*Ahlu*

Sunnah wal Jama'ah). Dari pesantren-pesantren ini maka lahirlah organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam di kemudian hari, seperti Nahdhatul Ulama (NU) yang berdiri pada tahun 1926. Dalam sejarah pertumbuhannya, NU adalah ormas pertama kali yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan organisasi inilah yang paling mudah menerimanya dibanding organisasi kemasyarakatan lain. Salah satu implementasi nilai ideologi Pancasila dalam hidup bermasyarakat di Indonesia adalah memupuk persaudaraan dan harga-menghargai antar umat Islam dan umat yang beragama lain. Hal ini membuktikan bahwa toleransi umat beragama mempunyai tempat dalam pesantren Ahlu Sunnah, NU dan Pancasila.

da Aceh: Iskandarmuda.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulloh Shodiq, 2012. *Syiah yang Kami Amati dalam Perspektif Sejarah*. Surabaya: Penerbit Hilal.
- Abdulloh Shodiq, 1998. *Delapan Tokoh Muslim yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah dari Masa ke Masa*. Pasuruan: Lembaga Ma'arif Kabupaten Pasuruan.
- Abdulloh Shodiq, 1993. *Konsepsi Sosiologi dalam Islam (Suatu Rangka Pikir Sosial Kemasyarakatan)*. Pasuruan: Lembaga Ma'arif Kabupaten Pasuruan.
- A Hasymi, 1983. *Syi'ah dan Ahlu Sunnah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ahmad Amin, 1965. *Fajrul Islam*. Kairo: Maktabah An-Nahdiyah Al-Misriyah.
- Badri Yatim, 2003. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yunus Jamil, 1968. *Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh*. Ba